

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tidak ada perbedaan dasar pengenaan pajak antara tinjauan teori dengan tinjauan praktek. Karena dasar pengenaan pajak hiburan ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.
2. Ada perbedaan pemungutan pajak hiburan terkait sistem pembayaran pajak. Pada teori pajak hiburan hanya dibayarkan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan sedangkan yang terjadi di lapangan masih banyak wajib pajak yang menggunakan jasa notaris untuk membayarkan langsung ke BAPENDA pajak terutangngnya.
3. Untuk dasar pengenaan tarif pajak hiburan BAPENDA kota Pekanbaru menggunakan PERDA No. 05 Tahun 2011 sebagai acuan dalam pengenaan tarif dari masing-masing objek pajak hiburan.
4. Dalam melakukan pemungutan pajak hiburan BAPENDA kota Pekanbaru mengalami kendala, yaitu :
 - a. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak Hiburan dalam melakukan pendaftaran bagi tempat hiburan yang mereka miliki. Karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan wajib pajak beranggapan bahwa hal tersebut hanya akan mempersulit wajib pajak itu sendiri.

- b. Belum terdatanya semua Objek Pajak Hiburan yang ada. Hal ini disebabkan masih minimnya SDM dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Banyaknya tunggakan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak. Dikarenakan wajib pajak beranggapan prosedurnya rumit serta lama dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggaknya.
- d. Minimnya SDM dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pengelolaan anggota oleh BAPENDA kota Pekanbaru.
- e. Kurangnya pengawasan terhadap objek-objek hiburan yang ada. Hal ini disebabkan karena para pegawai hanya terfokus terhadap objek-objek yang telah terdata sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pekanbaru, saran penulis adalah :

- a. Kepala BAPENDA kota Pekanbaru hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap pegawai-pegawainya. Baik dalam segi waktu, kinerja, loyalitas dalam melayani wajib pajak.
- b. Pihak BAPENDA harus melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak baik secara langsung ataupun tidak langsung bisa dengan cara media cetak dan elektronik.
- c. Pihak BAPENDA harus memberikan sanksi kepada wajib pajak, yang mana denda itu berlipat ganda apabila tidak juga dilunasi penunggakannya maka dapat dicabut izin usahanya.
- d. Untuk Wajib Pajak diharapkan lebih produktif dengan memberikan data-data atau dokumen yang benar-benar untuk mendukung perhitungan Pajak Hiburan agar dapat berjalan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- e. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya harus lebih ditingkatkan lagi. Dengan cara memberikan sanksi yang nyata kepada wajib pajak yang melalaikan kewajibannya.